



Abstrak

Refleksi dan proyeksi politik luar negeri untuk tahun 2013 telah dilakukan oleh Kemlu. Penilaian atas relevansi selanjutnya perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana sasaran dapat dicapai secara optimal. Untuk itu, analisis kritis atas perkembangan hubungan internasional ke depan perlu dibuat, dengan membandingkannya dengan langkah yang telah dan harus diambil parlemen (DPR), terutama Komisi I.

A. Pendahuluan

Sebagaimana di banyak negara, di setiap awal tahun dilakukan refleksi pelaksanaan politik luar negeri tahun sebelumnya dan juga presentasi garis-garis besar rencana pelaksanaan politik luar negeri tahun baru yang tengah dan akan dilalui dalam periode satu tahun ke depan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu), sebagai ujung tombak pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada 4 Januari 2013, telah melakukan penilaian dan paparan atas berbagai langkah kebijakan yang akan diambil Indonesia di tahun 2013. Kepada pers Menlu Marty Natalegawa mengungkapkan 9 refleksi dan rencana: (1) Prioritas kerja sama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat; (2) Peningkatan diplomasi ekonomi bagi konsolidasi pasar tradisional dan non-tradisional; (3) Pengintensifan perundingan perbatasan dengan negara tetangga; (4) Peningkatan perlindungan WNI dan TKI; (5) Pemeliharaan

perdamaian dan stabilitas di kawasan; (6) Mendorong konsolidasi demokrasi dan HAM di kawasan dan global; (7) Memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan; (8) Berkontribusi bagi pemeliharaan perdamaian, keamanan, dan keadilan pada tataran global; dan (9) Mendorong terwujudnya tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan.

Untuk menilai apakah refleksi dan langkah-langkah di tahun 2013 ini relevan dan realistis atau tidak, tentu dibutuhkan sebuah analisis. Upaya ini penting untuk menjadi perhatian parlemen (DPR), terutama Komisi I dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain yang terkait. Alasannya, Kemlu dan AKD tersebut merupakan pemangku kepentingan yang masing-masing mewakili pihak pemerintah dan parlemen, yang harus duduk bersama menentukan kebijakan nasional, terutama di bidang luar negeri.

*) Peneliti bidang Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: pptogin@yahoo.com



B. Realistiskah?

Dapat dikatakan, refleksi dan penilaian Kemlu terlalu normatif, dan luput menyusun sasaran spesifik, sebagai tindak lanjut dari langkah di tahun sebelumnya, yang seharusnya terkoordinasi antar-sektor dan antar-pemangku kepentingan. Sebagaimana diketahui, baru beberapa bulan lalu Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah mengajukan diri sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi *World Trade Organization* (WTO) di Bali untuk Desember 2013 mendatang. Seharusnya langkah-langkah kebijakan luar negeri sebagai persiapan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Konferensi WTO tersebut sudah tampak. Sebab, inisiatif Kemdag menggagas Indonesia sebagai tuan rumah dibebani agenda besar untuk mengatasi kemandekan Putaran Doha hingga dewasa ini dalam mendorong kemajuan realisasi perdagangan bebas. Sekalipun terdengar berita bahwa Kemlu kurang mendukung inisiatif ini, karena pesimis dengan prospek keberhasilan pencapaian targetnya, namun, jika sudah menjadi keputusan nasional, maka Kemlu harus mendukungnya. Memang dari 9 refleksi dan proyeksi Kemlu, pada urutan ke-2 disebutkan penekanan “diplomasi ekonomi yang diarahkan pada konsolidasi pasar tradisional dan perluasan pasar non-tradisional,” dan pada urutan ke-9 disebutkan kepentingan “mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan.” Juga disebut bahwa “Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri WTO di tahun 2013.” Tetapi, terkesan dukungan masih setengah hati untuk membuat langkah terobosan menciptakan perdagangan dunia, yang tidak hanya bebas, namun juga adil (*fair*), setelah dalam beberapa tahun belakangan mengalami stagnasi.

Banyaknya agenda besar lain membuat proyeksi politik luar negeri Indonesia menjadi kurang fokus. Selain itu juga dipertanyakan, dalam pembuatan pengagendaan tuan rumah konferensi tingkat menteri WTO, apakah tidak ada koordinasi antara Kemlu dan Kemdag dalam menjalankan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia, yang sesungguhnya merupakan persinggungan dari dua pemangku kepentingan yang berbeda? Padahal, pelaksanaan politik luar negeri dilandaskan pada doktrin dasar, bersinerginya berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai sebuah kepentingan nasional

yang optimal. Tampaknya koordinasi antara Menko Polhukam dan Menko Perekonomian juga tidak berjalan baik. Sebab, seharusnya persiapan pelaksanaan pertemuan tingkat menteri WTO ini sudah disiapkan sejak dini, mengingat sulitnya menjembatani perbedaan kepentingan yang kompleks di antara banyak negara, yang telah menggagalkan beberapa perundingan (sebelumnya). Dikhawatirkan, akibat persiapan yang tidak terkoordinasi dengan baik, pelaksanaan pertemuan di Bali pada Desember 2013 nanti tidak akan banyak manfaat.

Relevansi refleksi dan proyeksi awal tahun Kemlu tersebut juga dipertanyakan dengan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). Di sini ketersinggungan dengan kebijakan luar negeri Indonesia di APEC sebagai bagian dari proyeksi ke-7, yakni “memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.” Menlu Natalegawa mengungkapkan, “sebagai Ketua APEC, Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi bagi pembentukan tatanan ekonomi masa depan.” Namun, elaborasi untuk langkah antisipasi dan persiapan pelaksanaan APEC tahun 2013 ini, belum ada. Padahal, penyelenggaraan *event* besar dan mahal itu harus dimulai sedini mungkin dan dilakukan sebaik-baiknya, agar Indonesia meraih sasaran yang maksimal.

Dalam penjelasan awal tahun, Menlu mengatakan, politik luar negeri Indonesia jelas dan nyata. Tetapi, pernyataan tersebut seperti bersifat defensif. Karena, dalam kenyataannya langkah Kemlu lambat, maju-mundur, dan tidak konsisten. Sebagai contoh, baru saja menjelaskan 9 proyeksi kebijakan Indonesia itu, Menlu segera ke Myanmar membicarakan nasib kaum Rohingya, untuk mendorong pemerintah Myanmar menuntaskan solusi tuntas masalah etnis minoritas itu. Sementara, beberapa kesempatan besar sebelumnya yang tersedia ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu pemimpin Myanmar dan juga tokoh demokrasi, Aung San Suu Kyi, diabaikan. Di luar itu, forum-forum multilateral, yang juga spesifik, dalam kerangka ASEAN, tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebaliknya, pemerintah Myanmar justru menggunakan kunjungan Menlu Natalegawa pada 8 Januari 2013 untuk memberi beban RI agar membangun tempat-tempat perlindungan bagi pengungsi Rohingya di negerinya, dengan mengabaikan

pemberian hak kewarganegaraan bagi kaum minoritas itu.

Pencatuman proyek di tahun 2013 untuk konsolidasi demokrasi dan HAM di kawasan dan global juga menjadi ironis ketika hingga kini pelanggaran HAM di tanah air cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya intoleransi atas kelompok-kelompok minoritas. Terkait Myanmar, sikap baru Indonesia dalam soal penghormatan HAM juga disambut skeptis, karena pemerintah SBY dan Kemlu RI tidak berbuat dan, bahkan tidak berkomentar apa-apa ketika pemerintah Myanmar melakukan serangan militer membabi-butakan atas kelompok minoritas Kachin. Sementara, perlindungan atas nasib WNI/TKI di mancanegara, terutama Timur-Tengah dan Malaysia, terlalu lambat diberikan, yakni ketika masalah sudah muncul, akibat ancaman hukuman mati yang meningkat belakangan. Tekanan tidak bisa dilakukan terhadap negara-negara Arab, dan juga Malaysia, untuk membela nasib TKI yang tidak bersalah, atau mengalami tindakan kesewenang-wenangan, mengingat keterbatasan kapasitas diplomasi Kemlu dan posisi Indonesia yang amat tergantung pada pasar kerja mancanegara yang rendah kualitasnya.

Kritik senada juga dapat disampaikan terhadap perubahan sikap Indonesia yang drastis dan tiba-tiba dalam menyikapi perkembangan politik di Suriah, dengan menyerukan Presiden Assad segera mundur. Selama ini Indonesia berdiam diri terhadap aksi brutal rezim otoriter Assad atas masyarakat sipil dan eskalasi kekerasan di sana. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian (*peacemaking*) dunia karenanya diragukan. Sikap baru Indonesia pun baru disampaikan setelah Presiden Mursi dari Mesir, yang mendukung kelompok perlawanan di Suriah, menyerukan Assad untuk segera mundur dan diadili karena kejahatan perangnya yang telah menyebabkan 60 ribu orang tewas. Tetapi, yang jelas, Presiden SBY tidak menyerukan Assad agar diadili untuk tindakan kekerasannya atas rakyat sipil.

Secara simultan, pemerintah juga begitu bangga mengedepankan peran Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirim banyak pasukan TNI dan Kepolisian dalam *peacekeeping missions* di Timur-Tengah dan Afrika. Tampak kebijakan ego sektoral dalam hal ini, yakni antara Kementerian Pertahanan

(Kemhan) yang bangga mempromosikan pasukan penjaga perdamaian hasil binaannya dengan Kemlu, yang terbatas kapasitas dan ruang diplomasi di fora internasional. Kritik logis yang muncul adalah, jika mengirim *peacekeeping force* begitu antusias, mengapa untuk melakukan *peacemaking* tidak? Mudah-mudahan langkah maju Menlu tidak dibebani agenda lain Presiden untuk lebih meraih citra di dunia internasional terkait rencana prospektifnya setelah menyelesaikan jabatan kepresidenannya.

C. Sikap DPR

Dari perspektif parlemen, dalam soal hubungan luar negeri, parlemen tidak mempunyai agenda yang dibangun untuk mendukung kebijakan luar negeri yang telah diproyeksikan Kemlu/pemerintah secara tidak terfokus itu. Terlepas dari ini, untuk isu perbatasan, respons DPR pada tahun-tahun belakangan memang jauh lebih maju ketimbang yang dilakukan pemerintah, terutama dalam menanggapi klaim dan pelanggaran wilayah, hilangnya atau maju-mundurnya patok perbatasan, klaim warisan budaya, pelecehan terhadap WNI, khususnya TKI. Diplomasi yang ofensif terus diperlihatkan DPR, terutama Komisi I, dengan mendatangi Kuala Lumpur, KBRI, dan mitra kerja mereka seperti parlemen dan kalangan pemerintah Malaysia.

Langkah lebih maju lagi yang telah diperlihatkan parlemen adalah respons mereka terhadap isu Palestina. Anggota Komisi I telah menembus blokade Israel dengan segala resiko, dengan mengunjungi wilayah Tepi Barat untuk menyatakan dukungan kemerdekaan kepada Palestina dan rakyatnya yang terus menghadapi ancaman militer Israel. Sayangnya, untuk merespons meningkatnya intoleransi dan mengurangi eskalasi kekerasan di dalam negeri, langkah DPR masih tampak lambat dan belum maksimal. Sekalipun DPR untuk pertama kalinya telah menyelenggarakan *interfaith dialogues*, namun upaya itu perlu didorong kontinuitasnya dan ditindaklanjuti dengan mendukung pembuatan legislasi yang kondusif dan mencabut peraturan perundang-undangan yang justru memberi peluang bagi meningkatnya intoleransi antar-kelompok dan golongan.

D. Penutup

Agar kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 2013 dapat mencapai sasaran maksimal, selain lebih fokus, sinergi antara langkah pemerintah dan parlemen harus dilakukan. Kedua pihak tersebut tidak boleh berjalan masing-masing dengan target peningkatan citranya, sebab, sasaran politik luar negeri adalah kepentingan dan tujuan nasional.

Untuk penyusunan refleksi kebijakan luar negeri tahun sebelumnya dan proyeksi tahun berikutnya, perlu dilakukan koordinasi pemerintah dan parlemen, khususnya Kemlu dan Komisi I, sehingga refleksi yang dibuat bisa tepat, dan proyeksi yang disusun juga relevan, karena sejalan dan didukung oleh kebijakan di DPR. Dengan kata lain, produk-produk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR akan bersinergi secara komprehensif dengan langkah Kemlu dan kebijakan luar negeri pemerintah. Tidak perlu ada ego sektoral, instansi, institusi negara, ataupun kompetisi di antara mereka untuk pencapaian sasaran kepentingan nasional di fora internasional.

Rujukan:

1. Aris Heru Utomo, "Politik Luar Negeri RI Sekarang Lebih Percaya Diri," 19 September 2012, <http://www.republika.co.id>, diakses 8 Januari 2013.
2. Dessy Sagita, "Menlu: 2013, Prioritaskan Perlindungan WNI di Luar Negeri," 4 Januari 2013, <http://www.beritasatu.com>, diakses 8 Januari 2013.
3. "Ini Refleksi dan Proyeksi Politik Luar Negeri Indonesia," 28 Desember 2012, <http://www.republika.co.id>, diakses 8 Januari 2012.
4. "Dewi Fortuna Puji Kebijakan Diplomasi Publik Deplu," 6 September 2008, <http://www.antaraneews.com>, diakses 8 Januari 2013.
5. "Menlu: Politik Luar Negeri Indonesia Jelas dan Nyata," 4 Januari 2013, <http://www.tribunenews.com>, diakses 8 Januari 2013.
6. "9 Refleksi Kementerian Luar Negeri," 4 Januari 2013, <http://www.tempo.co>, diakses 8 Januari 2013.
7. "Myanmar Minta Indonesia Membangun Shelter," *Kompas*, 9 Januari 2013: 10.
8. "Permintaan SBY pada Assad," *Kompas*, 9 Januari 2013: 6.
9. "Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, RM Marty M. Natalegawa, Tahun 2013," Kemenlu RI, 4 Januari 2013, <http://www.kemlu.go.id>, diakses 8 Januari 2013.